DALAM SENGKETA, OMBUDSMAN MINTA RS MUARA TAMI TIDAK DIJADIKAN RS KHUSUS COVID-19

Senin, 30 Maret 2020 - Sussy Hapsyahri Ladopurap

Jayapura, Jubi - Ombudsman RI Provinsi Papua meminta Rumah Sakit atau RS Muara Tami tidak dijadikan rumah sakit khusus Pasien dalam Pengawasan korona atau PDP dan pasien Covid-19. Alasannya, tanah lokasi RS Muara Tami masih dalam sengketa, dan sengketa itu sedang ditangani oleh Ombudsman RI Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Provinsi Papua, Sabar Olif Iwanggin di Jayapura, Senin (30/3/2020). Pernyatan Iwanggin merupakan tanggapan atas keputusan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano yang menyetujui rencana penggunaan RS Muara Tami sebagai rumah sakit yang khusus menangani PDP dan pasien Covid-19.

Iwanggin menyatakan rumah sakit tipe C di Koya Barat, Distrik Muara Tami itu belum pernah beroperasi. Selain itu, tanah lokasi rumah sakit itu masih dalam sengketa, dan sengketa itu telah diadukan kepada Ombudsman RI Provinsi Papua.

"Menurut hemat kami, penanganan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura perlu lebih maksimal. Pemerintah Provinsi Papua telah menyediakan 14 Rumah Sakit yang digunakan sebagai rujukan penanganan Covid-19, tujuh diantaranya berada di Kota Jayapura, " ujar Iwanggin.

Iwanggin menyatakan setuju jika penanganan PDP dan pasien Covid-19 di Kota Jayapura terpusat, dan tidak dilakukan secara terpisah-pisah. "Seperti kita ketahui bahwa Rumah Sakit Abepura sudah menyatakan tidak melakukan pelayanan umum, selain rujukan. Hal itu perlu disikapi dengan menentukan RS mana saja yang khusus melakukan pelayanan Covid-19, agar model pelayanannya tidak menyebar," kata Iwanggin.

Ombudsman RI Provinsi Papua mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua. Ombudsman pun mengapresiasi pemerintah daerah di Papua yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Iwanggin menyatakan situasi saat ini membutuhkan langkah cepat dan strategis guna menangani serta mencegah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) menyetujui rencana RS Muara Tami dijadikan rumah sakit yang khusus menangani PDP korona dan pasien Covid-19. "Sebetulnya kami sudah menyarankan rumah sakit tersebut untuk digunakan saat rapat pertama yang juga dipimpin Gubernur Papua. Namun hal itu tidak ditanggapi," kata Mano kepada Antara, Senin (31/3/2020) pagi.

Ia menyatakan ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sudah mempertimbangkan penggunaan RS Muara Tami yang masih dalam tahapan pengerjaan itu. Tim Satgas Covid-19 Papua bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura sudah mengunjungi rumah sakit itu pada Minggu (29/3/2020).

Rumah sakit tipe C itu terletak jauh dari keramaian, dan berada di kawasan perbatasan negara dengan Papua Nugini. Akan tetapi, rumah sakit berkapasitas 100 pasien itu belum selesai dibangun, dan belum memiliki sumber air bersih dan belum dialiri listrik.

Selain RS Muara Tami, Pemerintah Kota Jayapura juga mempertimbangkan penggunaan Wisma Atlet Stadion Mandala sebagai tempat menangani PDP korona dan pasien Covid-19. Wisma Atlet juga bisa dijadikan tempat para tenaga medis yang mengani pasien Covid-19 beristirahat. "Wisma atlet Mandala juga bisa dijadikan tempat penanganan Covid-19, khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi," kata Benhur Tomi Mano.(*)